
PENINGKATAN EKONOMI DI TENGAH PANDEMI DALAM MENUNJANG PERGERAKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI SURABAYA

Oleh

Firda Miftakhul Jannah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

Email: firdamifta3107@gmail.com

Abstrak

Keberhasilan suatu negara dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu indikator kesejahteraan dan majunya suatu bangsa. Naik turunnya pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian kalangan luas, diantaranya pemerintah, pengamat ekonomi, pelaku bisnis maupun masyarakat. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi dipicu oleh banyak faktor mulai dari kegiatan perdagangan, tingkat produksi, inflasi dan beberapa faktor lainnya. Pandemi Covid-19 telah mangatarkan dunia menuju krisis yang mengerikan. Penemuan dan pengembangan vaksin masih butuh waktu setidaknya sampai akhir 2020. Sehingga pemerintah harus mengulur waktu agar fasilitas kesehatan tidak semakin kewalahan menghadapi wabah ini. Hampir seluruh kehidupan manusia dimuka bumi ini merasa telah di porak-porandakan oleh virus ini, tidak terkecuali pada sektor ekonomi. 269,6 juta total populasi penduduk Indonesia telah merasakan daya rusak covid-19. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di kuartal III, yang di mulai per juli 2020, hanya mampu tumbuh 1,4% atau melemah sampai minus 1,6%. Pada sisi lain, ancaman krisis pangan Nasional juga sudah mulai menjadi perhatian ekstra dari pemerintah. pada masa pandemi saat ini kondisi perekonomian Surabaya masih terbilang positif meski tidak terlalu signifikan. Namun, pihaknya memastikan bakal terus berupaya untuk meningkatkan perekonomian di Kota Pahlawan.

Kata Kunci : Ekonomi Surabaya, Pertumbuhan Ekonomi & Pandemi

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka Panjang. Simon Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan (Jinghan, 2012:57). Pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena penting yang dialami dunia belakangan ini. Pertumbuhan ekonomi menandakan kenaikan pada *output* suatu negara yang akan berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Perekonomian Indonesia diharapkan terus membaik dengan terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi (Jurnal JIEP, 2020). Proses pertumbuhan ekonomi tersebut

dinamakan sebagai *Modern Economic Growth*. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan output perkapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti dalam jangka panjang, kesejahteraan tercermin pada peningkatan output perkapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat (Jurnal Samudra Ekonomika, 2017). Menurut Lincoln (1997), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan *output* dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara

(Todaro, 2005). Menurut Sadono Sukirno (1996: 33), pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ialah pengeluaran pemerintah yang mana merupakan salah satu instrument kebijakan fiskal, hal ini merupakan salah satu bentuk peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan pengeluaran pemerintah terhadap sektor – sektor yang produktif sehingga mendorong kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga yang akan meningkatkan permintaan output barang maupun jasa. Net ekspor yang positif sehingga mampu memberikan surplus pendapatan dalam neraca perdagangan (Jurnal ekonomi-Qu, 2019).

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang (Boediono, 1985). Kata “perkapita” menunjukkan ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output total-nya (GDP) dan sisi jumlah penduduk. Proses kenaikan output perkapita, tidak bias tidak, harus dianalisa dengan jalan melihat apa yang terjadi dengan output total disatu pihak, dan jumlah penduduk dipihak lain. Sehingga menjelaskan apa yang terjadi dengan GDP total

dan apa yang terjadi pada jumlah penduduk. Oleh karena itu, posisi penduduk dalam pembangunan ekonomi menjadi penting karena pertumbuhan ekonomi sendiri selalu terkait dengan jumlah penduduk. Menurut Todaro (2011: 138), agar dapat tumbuh, setiap perekonomian harus menabung dan menginvestasikan bagian tertentu dari GDP. Semakin banyak yang ditabung dan diinvestasikan maka laju pertumbuhan ekonomi juga akan semakin cepat.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah aglomerasi, investasi, angkatan kerja yang bekerja, dan human capital investment. Aglomerasi atau pola pemusatan, yang artinya terjadi pemusatan berbagai industri ke dalam suatu tempat tertentu sehingga memunculkan pertumbuhan ekonomi baru pada tempat tersebut (Jurnal Of Economics, 2013). Di setiap negara berkembang pasti ingin melakukan pembangunan di segala bidang dan diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dapat menjadi negara maju, serta dapat mewujudkan tujuan untuk memakmurkan masyarakat dan meratakan pembagian pendapatan dalam rangka mewujudkan keadilan (Jurnal Ekonomi, 2017). Dalam konteks pembangunan ekonomi, pemekaran wilayah diharapkan akan mendorong pengembangan dan kreatifitas baru dalam mengelola potensidaerah yang dimiliki. Dorongan ini akan meningkatkan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini kurang diperhatikan (Jurnal Manajemen, 2014).

Pengeluaran pemerintah sebagai salah satu instrumen penting kebijakan fiskal diharapkan mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengoptimalkan peran tersebut dengan meningkatkan pengeluaran (*share*) terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Secara riil pengeluaran pemerintah juga meningkat sejalan dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Peran pemerintah dalam perekonomian

ditunjukkan oleh pengeluaran untuk bidang ekonomi dalam persentase dari total pengeluaran cenderung meningkat (Jurnal Ekonomi, 2008). Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi tetapi efek masyarakatnya yang terlalu rendah mengakibatkan diperlukannya analisa pengaruh karakteristik regional terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat penting untuk dikaji. Negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar serta penyediaan kesempatan kerja yang terbatas akan menghadapi masalah yang serius dengan tingkat pengangguran. Perkembangan yang terjadi dalam jumlah angkatan kerja (AK) tidak bisa dilepaskan dari laju pertumbuhan jumlah penduduk di suatu wilayah (Yesi, 2013).

Saat ini perekonomian global termasuk Indonesia mengalami ketidakpastian dan mengarah pada resesi ekonomi karena pandemi Covid-19. Beberapa negara seperti AS, Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, Hong Kong, dan Singapura mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada Triwulan I dan II Tahun 2020. Perlambatan ekonomi pasti akan berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020. Pandemi menimbulkan efek domino dari kesehatan ke masalah sosial dan ekonomi, termasuk pelaku usaha. Badan Pusat Statistik telah mencatat laju pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I (Januari-Maret) 2020 hanya tumbuh 2,97%. Angka ini melambat dari 4,97% pada Kuartal IV 2019. Bahkan, pertumbuhan jauh di bawah pencapaian Kuartal I 2019 yang mencapai 5,07%. Dan pada Kuartal II Tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32%. Sehingga ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan negatif pada Kuartal II 2020 (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gd. Nusantara I Lt. 2 Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta Pusat – 10270).

Peningkatan ekonomi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi harus bisa memperkecil dampak pada ketiga sektor (kesehatan, sosial ekonomi, dan dunia usaha). Di bidang kesehatan misalnya, pemerintah sudah memberikan dukungan peralatan bagi

tenaga medis, pembuatan RS darurat hingga mengupayakan RS rujukan untuk pasien Covid-19. Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, realisasi program PEN untuk bidang kesehatan baru sekitar Rp6,3 triliun dari pagu Rp87,55 triliun. Realisasi ini untuk insentif kesehatan pusat dan daerah Rp1,7 triliun, santunan kematian tenaga kesehatan Rp12,9 triliun, penyaluran gugus tugas Covid-19 Rp3,2 triliun dan insentif bea masuk kesehatan Rp1,4 triliun.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Surabaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi di Surabaya sampai akhir tahun ini masih bisa dijaga di level 1 persen atau jika terkontraksi minimal masih bisa 0,4 persen sejalan dengan kegiatan ekonomi yang mulai bergerak. Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menyatakan bahwa potensi pemulihan ekonomi kota Surabaya lebih cepat karena keberhasilan pembangunan di Surabaya selama ini disebabkan oleh inovasi dan kreativitas yang diluncurkan dengan didukung sikap berani mencoba, antara lain: urban farming yang awalnya bertujuan membantu menekan pengeluaran warga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut data World Bank menjadi 0 persen, bahkan OECD memprediksi terkontraksi 2,8 persen hingga 3,9 persen, sedangkan ADB memprediksikan minus 1 persen. Menurut Luthfi, untuk mengejar pemulihan ekonomi Surabaya di 2 kuartal terakhir tahun ini, Hipmi berharap pencairan dana bantuan terutama untuk kelas UMKM agar secepatnya disalurkan untuk mengurangi beban operasional dan tetap bisa bertahan di masa pemulihan ekonomi sampai akhir tahun. Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan masa pandemi ini adalah masa yang sulit bagi kota Surabaya dan juga seluruh Indonesia karena pertumbuhannya diperkirakan minus. Menurut wali kota Surabaya, Tri Risma mengatakan bahwa pada masa pandemi saat ini kondisi perekonomian Surabaya masih terbelang positif meski tidak terlalu signifikan. Namun pihaknya

memastikan bakal terus berupaya untuk meningkatkan perkonomian di kota Surabaya.

Surabaya perekonomiannya terbilang positif meskipun tidak terlalu tinggi di atas 1 persen. Jika kondisi perekonomian menurun maka yang terjadi adalah PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau kejahatan. Karena itu Wali Kota Surabaya dan jajarannya mencoba pelan-pelan untuk menghidupkan perekonomian Surabaya agar tetap stabil (jelas Risma di acara penancangan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 di Papan Kabupaten Utara). Warga Surabaya sangat semangat untuk menumbuhkan perekonomian, terlihat dari warga yang semakin disiplin dalam menjalan protokol kesehatan. Bahkan di beberapa pasar tradisional yang sebelumnya pernah diliburkan karena ditemukan ada beberapa yang terpapar, kini para pedagang terlihat mulai mentaati peraturan pemerintah dan saling mengingatkan antar sesama. Oleh karena itu kasus covid-19 di Surabaya saat ini sudah bisa dikendalikan. Bahkan jumlah kesembuhan di kota pahlawan terus bertambah. Setidaknya ada 120 pasien Covid-19 yang sembuh pada hari ini. Sementara itu ada 400 pasien sedang menjalani rawat inap dan 300 rawat jalan.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menyatakan bahwa potensi pemulihan ekonomi kota Surabaya lebih cepat, lantaran memiliki letak posisi yang strategis dan infrastruktur pendukung seperti Pelabuhan, Bandar Udara, serta pembangunan Jalan dan Saluran Utilitas. Indikator mikro ekonomi (data penjualan dan penerimaan pajak daerah) tunjukkan “*bottom rock*” sudah terlewati di bulan Mei 2020, Juni dan Juli terus menuju pemulihan. Perbaikan kondisi perekonomian kita harapkan bisa berkesinambungan, sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya 2020 diproyeksikan masih tetap positif serta diproyeksikan bisa mencapai angka 6,78% hingga 9,51% di tahun depan,” ungkap Risma dalam sambutannya dalam upacara peringatan HUT RI ke-75 di Balai Kota Surabaya, Senin (17/8/2020). keberhasilan pembangunan di Surabaya selama ini disebabkan oleh inovasi dan kreativitas yang

diluncurkan dengan didukung sikap berani mencoba, antara lain: urban farming yang awalnya bertujuan membantu menekan pengeluaran warga.

Meski di masa pandemi Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tetap berupaya untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat. Terutama kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pahlawan yang terdampak pandemi sehingga membuat omzet penjualan mereka menurun. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, sesuai dengan konsepnya, Sentra Wisata Kuliner (SWK) di Surabaya bertujuan untuk menampung atau merelokasi UMKM yang terdampak pembangunan. Seperti pembangunan jalan, saluran ataupun jembatan. Pada saat pembangunan jalan, saluran, atau jembatan para pedagang harus pindah atau direlokasi. Karena direlokasi, maka kemudian mereka ditampung ke SWK. Namun SWK bukan hanya dapat dimanfaatkan bagi para pelaku UMKM yang terdampak pembangunan. Warga sekitar SWK yang ber KTP Surabaya juga dapat menggunakan sentral itu untuk menampung pelaku usaha UKM yang ada di wilayah sekitarnya. sentra PKL atau SWK merupakan wujud kepedulian Pemkot Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat. Sebab, dalam proses pembangunan, tentunya ada warga yang terdampak seperti para pedagang. Karena itu, mereka mendapat solusi atas permasalahan dampak dari pembangunan tersebut. Pihak Pemkot tidak asal gusur tanpa adanya solusi. Tapi yang pasti mereka memberikan solusinya dengan membuat penampungan berupa SWK agar mereka bisa tetap berjualan.

Bencana pandemi Covid-19 kemudian melanda Surabaya, bahkan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga otomatis omzet penjualan pedagang di SWK itu ikut menurun. Apalagi, saat penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Surabaya Raya, pedagang di SWK tidak diperbolehkan menerima pembeli di tempat. Hal itu otomatis

berdampak pada omzet penjualan para pedagang. Menurut Widodo, untuk memulihkan ekonomi di Surabaya di masa pandemi harus dilakukan secara komprehensif. Peralannya, hampir semua sektor terdampak pandemi dan terutama para pelaku UMKM. Karena itu kemudian Pemkot Surabaya mengambil langkah cepat agar penjualan para pedagang khususnya UMKM itu tetap berjalan. Salah satunya yakni menerapkan sistem penjualan take away di SWK tersebut.. Tapi sekarang sudah diperbolehkan untuk menerima pembeli di tempat, namun dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan, Di samping itu untuk meringankan beban para pedagang di Sentra PKL atau SWK karena dampak pandemi, pemkot sebelumnya juga membebaskan biaya retribusi SWK selama tiga bulan. Yakni, bulan April, Mei dan Juni 2020. Tujuannya tak lain, agar roda perekonomian para pedagang di SWK itu tetap berputar.

Seiring berjalannya waktu, kini penjualan di sentra PKL atau SWK di Surabaya terus merangkak naik. Bahkan, omzet penjualan para pedagang terus meningkat. Sejak bulan Juli 2020, para pedagang di SWK mulai dapat berjualan dengan menerima pembeli di tempat. Namun, dengan catatan tetap menjalankan protokol kesehatan. Pemkot bekerjasama dengan layanan antar, seperti ojek online dan sebagainya. Memang saat ini tidak kelihatan orangnya (pembeli) yang datang di SWK tapi omzet-nya naik. Bisa lihat dari pantauan kasir kami yang ada di masing-masing SWK itu lebih banyak menggunakan layanan antar itu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkopum) Kota Surabaya, Widodo Suryantoro menyatakan, bahwa sistem single kasir telah lama berjalan di beberapa SWK Surabaya. Ini bertujuan untuk memantau transaksi penjualan di masing-masing SWK tersebut, apakah naik atau menurun. Sehingga kemudian pemkot bisa segera sigap mencari solusi atas permasalahan itu.

PENUTUP

Surabaya telah mengklaim dirinya sebagai Kota Jasa dan Perdagangan. Lebih dari itu Kota Surabaya adalah Kota bisnis dengan berbagai aktivitas yang berlangsung. Ibarat sebuah toko, Surabaya adalah Toko Serba Ada. Didalamnya berlangsung segala aktivitas, serta tersedia segala fasilitas yang mendukung.. dengan peran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam upaya maksimal untuk menjaga ekonomi di Kota Pahlawan agar tetap positif. Tentu saja, upaya ini juga harus didukung masyarakatnya dengan cara disiplin protokol kesehatan. Pertumbuhan ekonomi di Surabaya di atas pertumbuhan Nasional. Karena 92 persen usaha di Surabaya itu ekonomi menengah, jadi dia tidak terpengaruh kepada perekonomian global. Tapi kalau sudah sekali jatuh makan akan menurun drastis sehingga harus ditahan, diberikan ruang untuk dia (usaha) bisa gerak tapi tetap dengan protokol yang sangat ketat. Dengan adanya Sentra Wisata Kuliner (SWK) di Surabaya bertujuan untuk menampung atau merelokasi UMKM yang terdampak pembangunan. . adanya pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan usaha SWK sehingga pemkot bergerak cepat dengan menerapkan sistem penjualan take away di SWK tersebut. Sehingga penjualan akan terus naik dan berjalan, namun seiring dengan kesadaran masyarakat surabaya akan pentingnya mentaati protokol kesehatan maka telah diperbolehkan penjualan secara tatap muka.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adi, Prio Hari. 2006. *Hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belajar pembangunan dan pendapatan asli daerah*.
www.multiparadigma.lecturer.ub.ac.id.
Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang. Padang, 23-26 Agustus.
- [2] Arifin. 2019. *Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan ekonomi di provinsi Riau*. Vol 7.
<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/turast/article/view/1300/1046>

- [3] Boediono. 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- [4] Fajrin, Verawati. 2019. *Analisis pertumbuhan ekonomi di pulau madura*. Vol 9. 1 april.
- [5] Febryani, Tafeta, Kusreni, sri. 2017. *Determinan Pertumbuhan Ekonomi di 4 Negara ASEAN*. Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan. Juni.
- [6] Jhingan, M.L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. (Alih Bahasa: D. Guritno). Jakarta: Rajawali Pers
- [7] Ma'ruf, Ahmad, Wihastuti Latri. 2008. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Determinan dan Prospeknya*. Vol. 9. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. April.
- [8] Pambudi, Eko Wicaksono, Miyastro. 2013. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor yang mempengaruhi (Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah)*. Vol. 2. Jurnal Of Economics.
- [9] Putra, Gede Noparima ari, dkk. tt. *Pengaruh Produksi dan Inflasi terhadap Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. E-Jurnal EP Unud.
- [10] Rany, Alya P, dkk. 2020. *Tantangan Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui Indonesia green growth program oleh BAPPENEAS*. Vol 20. 1 Maret.
- [11] Sudono, Sukirno. 2007. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Kemcana Pers.
- [12] Supartoyo, Yesi Hendriani, dkk. 2013. *The Economic Growt and The Regional Characteristics: The Case Of Indonesia*. Bulletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, juli 2013.
- [13] Syahputra, Rinaldi. 2017. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Vol 1. Jurnal Samudra Ekonomika. 2 Oktober.
- [14] Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas*. Jakarta: Erlangga.
- [15] Todaro, Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta : Erlangga.
- [16] Widada, Rasyid, dkk. 2014. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Haol Pemerkan di Indonesia*. Vol. 6. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Oktober.